PENERAPAN OTONOMI DAERAH
DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN JAYAPURA

Angelica Sisentia Aulin, Ekklesia Nauly, Elisabeth Ryanthie Maya Puteri, Gabriella Vanessa Awoitauw

(Humanities I UPH College)

UPH COLLEGE, Tangerang, Indonesia.
E-mail : angelica.aulin@student.uphcollege.ac.id, ekklesia.nauly@student.uphcollege.ac.id, elisabeth.puteri@student.uphcollege.ac.id, gabriella.awoitauw@student.uphcollege.ac.id

Abstract

COVID-19 is declared a worldwide pandemic which causes impacts in all aspects. The government is expected to be able to make policies and preparedness to deal with the impact of this pandemic. The need for cooperation between the government and the community. The existence of policies and the implementation of Regional Autonomy in increasing awareness of the spread of COVID-19. The purpose of this study was to find out how regional autonomy is able to increase awareness of COVID-19 in Jayapura Regency. This study uses qualitative research, case study method, with structured interview (Audio-Visual by using Zoom) as our way to collect data from our chosen sample. Informant that have been selected by the researchers have met the criteria and are selected deliberately and based on certain considerations that is known to be called purposive sampling. The conclusion of our research is the number of policies and efforts of the government to protect its people from the covid-19 outbreak, for example with the government providing supervision when the new normal is implemented so that the community remains at a distance from each other, They also has provided online education such as websites or facebook. The final step of the government in trying to provide the best facilities for its people in the field of health, education, and security.

Keywords: *Government, Regional Autonomy, COVID-19*

Abstrak

COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi diseluruh dunia yang menyebabkan dampak kepada seluruh aspek. Pemerintah diharapkan untuk dapat membuat kebijakan dan kesigapan untuk mengatasi dampak dari pandemi ini. Dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Adanya kebijakan serta penerapan otonomi daerah dalam meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah otonomi daerah dapat meningkatkan kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi (*Audio-Visual* menggunakan Zoom). Narasumber yang telah dipilih oleh peneliti telah memenuhi kriteria dan dipilih secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dikenal dengan teknik *purposive sampling*. Kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah kebijakan dan usaha pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari wabah COVID-19 ini, misalnya dengan pemerintah memberikan pengawasan saat *new* normal baru dilaksanakan agar para masyarakat tetap menjaga jarak satu sama lain. Serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti, pemerintah sudah memberikan edukasi secara daring seperti *website* atau facebook. Serta usaha terakhir dari pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas terbaik untuk para masyarakatnya entah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Kata Kunci: Pemerintah, Otonomi Daerah, COVID-19

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pandemi dinyatakan ketika penyakit baru tersebar di seluruh dunia melampaui batas. Pemerintah Indonesia menetapkan virus Corona sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020 yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020. Adanya Pandemi COVID-19 ini sudah dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan, baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Pemerintah bersama dengan pemerintahan daerah saling bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini. Adanya otonomi daerah yang berlaku untuk dapat memberikan kebijakan dan kesigapan pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat mengatasi dampak dari pandemi. otonomi daerah yang ditetapkan seharusnya dapat menyeluruh dan merata untuk bisa dijangkau dalam menerapkan COVID-19, sehingga penanggulangan COVID-19 bisa lebih efektif.

Kondisi aktual yang ada adalah masyarakat yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah, misalnya tidak menjaga jarak dengan masyarakat yang lain, tidak menggunakan masker, dan bepergian dengan banyak orang atau teman. Sedangkan kondisi ideal sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi. Dimana harapan pemerintah adalah masyarakat bisa mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga kebersihan entah kebersihan tubuh maupun sekitar, lalu keluar dari rumah kalau memang mendesak karena jika kondisi ideal ini terwujud di tengah masyarakat, COVID-19 sudah dapat diatasi dengan mudah.

Menurut Van Der Pot yang dikutip dari M. Laica Marzuki (Despan Heryansyah,2016:25) menjelaskan konsep otonomi daerah dengan istilah *eigen houishouding* yang berarti mengurus rumah tangganya sendiri. Busrizalti (H.M Busrizalti, 2013:71) menguraikan dengan adanya otonomi daerah maka memungkinkan hadirnya *local wisdom* tiap- tiap daerah agar dapat berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan masyarakat daerah tersebut. Mahfud MD menjelaskan otonomi daerah memiliki peran sebagai keleluasaan dalam mengelola wilayah sendiri tanpa mengandalkan pemerintah pusat guna mengimplementasikan tugas yang diberikan padanya. sehingga, untuk menciptakan kesetimbangan perlu dikaji kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maksudnya, sebagai daerah dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan sebagai perwakilan pusat dapat menjalankan

tugas sebagai pemerintah Republik Indonesia di daerah (Mahfud, MD, 2012:95).

Berdasarkan jurnal penelitian yang diunggah oleh Diyar Ginanjar pada 30 Juni 2020, nyatanya upaya penegakan hukum pemerintah daerah yang mengakibatkan efek jera belum bisa efektif untuk diterapkan. Pemda dengan misalnya aparat Polisi Pamong Praja bersama dengan penegak hukum lainnya, hanya bisa memberikan tindakan sebatas imbauan, dimana hal tersebut tidak cukup untuk membatasi Masyarakat untuk tetap bekerja dari rumah serta tidak berkerumun yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pasal 4 ayat (1) huruf a. Diperlukan langkah yang lebih tegas daripada hanya sekadar mengharapkan tumbuhnya kesadaran publik secara masif pada situasi pandemi seperti ini.

Diperlukan terobosan pemerintah daerah seandainya pemerintah pusat dinilai belum sigap dalam memberikan kebijakan terkait masalah pandemi, karena mengacu pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kewajiban pemerintah di tingkat lokal salah satunya yakni melindungi masyarakat yang ada di wilayahnya. Contohnya, kebijakan yang diambil pemerintah daerah Jawa Barat melalui tiga stateginya yakni: pertama melakukan pencegahan dengan mengeluarkan larangan mudik dan mengaplikasikan kedisiplinan terkait menjaga jarak aman; *kedua*, melakukan pelacakan tes secara besar-besaran kepada penduduk untuk mengetahui persebaran COVID-19 di Jawa Barat; dan ketiga, dengan menyediakan 105 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dan peralatan ventilator buatan lokal.Terjadi kegamangan di level pemerintah daerah terkait kondisi darurat kesehatan masyarakat, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi tergantung pada komitmen dan kemampuan fiskal di daerah.

Peneliti ingin mencari tahu akan proses upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terkait koordinasi mereka dengan pemerintah pusat, dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat di wilayah himbauan terhadap COVID-19. Hal ini berbasis pada teori yang pernah disampaikan oleh Bahder Johan bahwa bahan primer dalam melakukan pengkajian penelitian ini bukan merupakan data atau fakta sosial melainkan berasal dari bahan hukum tingkat utama dan tingkat dua (Bahder Johan Nasution, 2016: 86). Perihal ini menunjukkan bahwasanya tentang kebutuhan pihak pemerintah daerah dalam penyelarasan strategi otonomi miliki mereka dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Prosedur ini juga akan peneliti bandingkan dan coba untuk telusuri bersama informan akan kemungkinan faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan regulasi tersebut.

Berdasarkan kondisi ideal dan realita di atas melalui jurnal ini peneliti ingin melihat Penerapan otonomi daerah dalam Meningkatkan Kewaspadaan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura.

SEJARAH PEMBENTUKAN OTONOMI DAERAH

Menurut Dadang Sufianto (2020), pembuatan peraturan pemerintah daerah sudah berlaku sejak zaman kemerdekaan. Berawal mula dengan Jawa dan Madura yang diberlakukan *Bestuurs hervormings wet* (UU penyesuaian pemerintahan), sehingga peraturan desentralisasi pun diakhiri dan UU Nomor 1 1945 pun disahkan. Konsep ini dilihat akibat perkembangan Indonesia di masa lalu yang bergantung pada kerajaan serta kesadaran bahwa rakyat memerlukan perwakilan yang representatif, sehingga terbentuk badan perwakilan tiap daerah yang terdiri dari karesidenan, kabupaten, dan kota.

Lanjutnya singkat hingga tahun 1999, Undang-Undang terus berkembang hingga awal orde baru ini telah ditetapkan penyerahan kewenangan politik dan administrasi oleh jenjang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dari perkembangannya, modifikasi peraturan hingga tahun 1999 juga masih berlaku; UU Nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan, yang setelahnya menimbulkan keberhasilan otonomi daerah yaitu meningkatnya 70% sumber daya dari masing-masing wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam. Namun karena kurangnya keseimbangan sehingga UU Nomor 33 tahun 2004 lalu dikeluarkan lagi menggantikan UU No. 25 dan membuat keuangan pemerintah daerah menjadi lebih stabil.

DEFINISI OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153). Istilah ini berakar dari *autos* yang bermakna mandiri serta *namos* bermakna regulasi (Ni'matul Huda, 2014:409). Makna membuat perundang-undangan sendiri kini telah bergeser seiring perkembangan jaman, sehingga tema otonomi daerah selain dimaknai mebentuk regulasi sendiri yakni peraturan daerah, sekarang mencakup pula dengan pemerintahan sendiri. Menurut Kansil, otonomi daerah adalah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.

Dari ketiga sumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan peraturan daerah untuk membentuk regulasi sendiri dengan koordinasinya oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

CIRI-CIRI OTONOMI DAERAH

Menurut Mutawakkil (2020), otonomi daerah memiliki beberapa ciri-ciri seperti terdapat aturan di dalam sebuah daerah yang berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan, aturan-aturan tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, Presiden berhak menentukan hukum, DPRD tidak memiliki hak veto dalam rancangan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR, peraturan yang terdapat di daerah dapat dicabut oleh pemerintah pusat, dan bersifat semi sentralisasi,

Menurut Riwu Kaho (dalam M. Makhfudz, 2012), otonomi daerah memiliki ciri-ciri yaitu terdapat urusan-urusan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atas kepada daerah untuk diatur dan diurusnya dalam batas-batas wilayahnya, pengaturan dan pengurusan urusan tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri dan didasarkan pada kebijaksanaan daerah terkait dan adanya alat-alat perlengkapan atau aparatur sendiri untuk mengatur urusan-urusan tersebut, maka dari itu daerah perlu memiliki sumber-sumber pendapatan atau keuangan sendiri.

Menurut Yusron (2020) otonomi daerah mempunyai ciri ciri seperti adanya peraturan daerah masing masing yang berkedudukan dibawah undang undang menurut hierarki peraturan perundang undangan, peraturan daerah saling terkait dan tidak boleh bertentangan dengan undang undang, DPRD Provinsi atau DPRD Pusat tidak punya hak veto terhadap rancangan undang undang atau undang undang yang disahkan DPR, adanya suatu intervensi kebijakan dari pusat dan jika melakukan perjanjian dengan pihak asing, maka diperlukan persetujuan pemerintah pusat.

Dari ketiga sumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri otonomi daerah yaitu berdasarkan dengan UU yang telah ditetapkan, DPRD provinsi dan pusat tidak memiliki hak veto serta bersifat semi sentralisasi yang dimana semuanya berpusat di pemerintahan pusat.

FUNGSI OTONOMI DAERAH

Fungsi otonomi daerah adalah Fungsi pelayanan adalah fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak boleh pilih kasih, tetapi memberikan hak yang sama kepada semua orang. Selain itu pemerintah juga memiliki fungsi pengaturan adalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dan yang terakhir, adalah fungsi pemberdayaan di mana masyarakat harus tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Gischa,2020).

Selain itu secara khusus, Dinas Provinsi sebagai unsur pelaksana memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan hukum serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai

dengan lingkup tugasnya (Bratakusumah, 2004).

Menurut Pratolo (2011), otonomi daerah berfungsi untuk mewujudkan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Dari ketiga sumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa otonomi Daerah memiliki fungsi untuk memehuni kebutuhan masyarakat secara merata, masyarakat memiliki hak yang sama kepada semua orang. otonomi daerah juga untuk mewujudkan pendidikan politik dan menciptakan stabilitas politik.

MANFAAT OTONOMI DAERAH

Manfaat diterapkannya sistem otonomi daerah yaitu: Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. Pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga terlibat. Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat. Daya kreasi dan inovasi masyarakat di daerah akan semakin meningkat, karena setiap daerah pasti berusaha menampilkan keunggulan di daerahnya. Meningkatnya pengawasan kegiatan yang dilakukan. Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biasa yang disesuaikan. Memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan. Lembaga masyarakat mengalami peningkatan (Ahmad, 2020).

Menurut Illham (2020) manfaat dari diterapkannya sistem otonomi daerah yakni agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik, pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, karena pemerintah daerah juga terlibat didalamnya, memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan, lembaga masyarakat mengalami peningkatan, kesejahteraan masyarakat di daerah lebih berkembang, meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dan meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biasa yang telah disesuaikan.

Menurut BKPSDMD (2017), manfaat dari otonomi daerah yaitu daerah dapat mengatur rumah tangga sendiri sehingga pemberdayaan masyarakat, pengelolaan anggaran dan sumber daya alam menjadi lebih efektif dan efisien, dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dari ketiga sumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari otonomi daerah adalah agar tidak terjadi

pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggara pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, kesejahteraan masyarakat di setiap daerah berkembang, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalm proses pembangunan.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

Tujuan otonomi daerah menurut UU No 3 Tahun 2014 adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga menumbuhkan kreativitas masyarakat (Zakky, 2020).

Menurut Gischa (2020) Tujuan otonomi daerah Terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, di antaranya: Distribusi regional yang merata dan adil Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik Adanya sebuah keadilan secara nasional. Adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antardaerah terhadap integritas Republik Indonesia. Mendorong pemberdayaan masyarakat Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Menurut Widyananda (2020) Tujuan dari otonomi daerah adalah dapat dilihat dari sisi Politik adalah harus sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Dari Segi Ekonomi adalah Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Dari Kacamata Sosial adalah menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju sutu daerah yang otonom. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program/bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom.

Dari ketiga sumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang dimana dapat digunakan untuk menjaga hubungan harmonis antara pusat, daerah dan antardaerah terhadap integritas Republik Indonesia dalam menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Menurut Rondinelli dan Cheema (dalam Irianto,2015), ada empat faktor yang dipandang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi bebas, yaitu:

- *Environmental conditions: M*encakup faktor seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infrastruktur politik, organisasi kepentingan, tersedianya sarana dan prasarana fisik. karakteristik struktur lokal, kelompok-kelompok sosial-budaya yang terlibat dalam perumusan kebijakan, kondisi infra-struktur. Hal ini memainkan peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- *Interofrganizational relationship:* Rondinelli memandang bahwa keberhasilan pelaksananaan otonomi daerah memerlukan interaksi dari dan koordinasi dengan sejumlah organisasi pada setiap tingkatan pemerintahan dan kalangan kelompok-kelompok yang berkepentingan.
- *Resources for program implementation:* Kondisi lingkungan yang kondusif (dapat memberikan diskresi lebih luas kepada pemerintah daerah dan hubungan antar organisasi yang efektif) sangat diperlukan bagi terlaksananya otonomi daerah. Kelemahan yang selama ini dijumpai di negara-negara sedang berkembang ialah keterbatasan sumber daya dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengambil sumber-sumber pendapatan yang memadai guna melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat.
- *Characteristic of implementing agencies: D*iutamakan kepada kemampuan para pelaksana di bidang keterampilan teknis, manajerial dan politik, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan
  - mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi maupun dukungan yang datang dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya. Hal yang pentingnya adalah kepemimpinan yang berkualitas, dan komitmen staf terhadap tujuan kebijakan.

INDIKATOR OTONOMI DAERAH

Menurut WHO, indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Indikator yang dapat mengukur kemajuan pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah :

1. Transparasi pengelolaan APBD. Pengelolaan dapat dilihat dari pemantauan dari Kementrian Keuangan dan Kementrian dalam negeri dalam mengevaluasi laporan anggaran APBD dari masing-masing daerah. Hal ini juga termasuk laporan Penyesuaian APBD, setelah

dilakukannya evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, akibat perkembangan pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang memerlukan penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai

2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Dapat dikontrol dengan penerapan *lockdown* ataupun desentralisasi dari pemerintah pusat terkait *New Normal,* namun hal ini harus di dukung dengan implementasi dari tiap daerah. artinya, kebijakan-kebijakan ini juga harus terus dievaluasi demi menemukan pola-pola baru, termasuk perlunya juga proses preventif dan represif. Oleh karena itu, hal yang perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bagaimana pemerintah pusat mempunyai pemetaan yang jelas sehingga setelah kebijakan PSBB dapat dirumuskan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan oleh daerah-daerah yang belum menetapkan kebijakan ini. (Tandjung, 2020)
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan masyarakat. Hal ini bisa dikontrol dari ILM (Iklan Layanan Masyarakat), terutama dengan akses teknologi di tengah pandemi yang terus meningkat sehingga pemerintah juga dapat mengambil andil dalam upaya penyebaran informasi waspada COVID-19 yang kreatif dan menarik bagi masyarakat. Manfaatnya adalah untuk menyebarkan informasi bermanfaat mengenai COVID-19 terhadap masyarakat serta kontribusi dalam komunikasi melalui berbagai media massa.
4. Menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu mengelola konflik yang ada di tengah pandemi COVID-19. Pendisplinan masyarakat termasuk akses warga dalam suatu wilayah serta pemerataan kebijakan daerah, yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat lokal dalam menjalankan peraturan yang diberikan.

SEJARAH COVID-19

Menilik ke belakang, China tercatat sebagai negara pertama yang melaporkan adanya kasus Covid-19 pada 31 Desember 2019. Pada akhir tahun 2019, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan informasi mengenai adanya sejenis pneunomia yang penyebabnya tidak terdeteksi. Infeksi pernapasan akut yang menyerang bagian paru-paru terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwajib, beberapa pasien pengidap merupakan pedagang yang berdagang di Pasar Ikan Huanan. Jumat, 3 April 2020, kasus COVID-19 tembus 1 juta, tersebar di sejumlah negara. Sampai dengan tanggal tersebut pukul 09.36, data dari *Johns Hophkins University*, menyampaikan jumlah

pasien positif virus Corona mencapai 1.015.403 orang (Bebas Kompas, 2019)

Angka total kematian 53.030 orang dan 210.579 orang yang terpapar COVID-19 berhasil sembuh. Setelah China secara teratur melaporkan virus tersebut pada negara sekitarnya dan kepada WHO, akhirnya lembaga kesehatan dunia tersebut menyatakan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020 (New York Times, 2020). Lalu pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru ini disebut" COVID-19". Kasus Covid-19 di luar China pertama kali dilaporkan oleh Thailand pada 13 Januari 2020 diikuti oleh Arab lalu menyebar ke benua lainnya. Sedangkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang terkena COVID-19 sebelumnya melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Sejauh ini, angka terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus meningkat. sebulan lebih sejak dinyatakan resmi muncul di Indonesia jumlah kasus pengidap virus korona di Indonesia mencapai di atas 5.500 kasus. (Nasional Kompas, 2020)

DEFINISI

COVID-19 telah menjadi pandemi global yang kini kian parah dengan banyaknya korban yang terkena dampaknya. Ada baiknya jika kita mengenal virus ini agar lebih berhati-hati, dimulai dari definisinya. Menurut KemenKes, COVID-19 (*coronavirus disease* 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Menurut WHO, virus corona merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS)* (Budiansyah, 2020*).* Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, virus corona penyebab sakit COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi inter-spesies (Halidi,2020).

Dari ketiga sumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang salurang prnapasan hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS).*

CIRI-CIRI COVID-19

Menurut CDC (*Centers for Disease Control and Prevention, 2020*), gejala COVID-19 terbaru akan terlihat dalam jangka waktu 2-14 hari setelah terpapar virus. Simptom terdiri dari; Demam atau kedinginan, batuk, sesak napas atau kesulitan bernapas, kelelahan,

nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau baru, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, mual atau muntah dan diare.

Namun tak kadang gejala yang timbul pada seseorang akibat COVID-19 dapat berupa bentuk yang tidak terduga termasuk gejala gastroinstenal, perubahan warna kulit, masalah mata hingga kemungkinan terkena *Happy Hypoxia Snydrome* pun menjadi semakin diwaspadai setelah menemukan gejala ini di salah satu pasien COVID-19 di Indonesia (Ika, 2020). Pakar Penyakit Dalam Spesialis Paru-Paru (Internis Pulmonologist) FKKMK UGM, dr. Sumardi, Sp.PD,KP., FINASIM., mengatakan H*appy Hypoxia Syndrome* merupakan kondisi seseorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh, tetapi terlihat seperti orang normal. Normalnya, kadar oksigen dalam tubuh seseorang adalah di atas 95%. Penurunan kadar oksigen dalam kondisi ini tidak membuat orang kesulitan bernapas ataupun tidak merasa terengah-engah (Suhendra,2020).

DAMPAK DARI COVID-19

Dampak positif (Hasanah, 2020) :

- Waktu

Dengan kita diminta untuk berdiam diri di rumah, maka kita pun bisa memiliki banyak waktu dan bisa kita gunakan untuk misalnya menghabiskan waktu dengan keluarga, melakukan hobi kita, dan lainnya tergantung dari orang itu akan menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat atau akan dibuang sia-sia.

- Kesehatan

Dengan adanya COVID-19 kita dituntut untuk bisa selalu bersih agar terhindar dari virus ini, jadi jika kita menjaga kebersihan maka kesehatan kitapun terjaga dan itu adalah salah satu nilai positif yang bisa kita ambil.

Dampak negatif :

- Ekonomi

Sudah sangat pasti ekonomi akan menurun bahkan drastis, orang-orang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan mereka. Padahal kebutuhan yang harus terpenuhi banyak dan ini sangat menganggu kehidupan masyarakat.

- Edukasi

Dalam hal edukasi masih bisa dijalani dengan baik namun kurang efektif karena hanya bisa bertemu melalui online. Karena itu juga jadi banyak anak-anak yang mau bersekolah namun karena tidak memiliki handphone yang memadai atau kuota yang banyak jadi akhirnya sekolah mereka terhambat.

FAKTOR PENYEBARAN

- Virus COVID-19 adalah virus jenis baru, dan system imun tubuh manusia belum bisa mengendalikannya dengan baik.
- Masa inkubasi virus dalam sel inang relative lama, bisa sampai 14 hari

bahkan 20 hari sehingga peluang untuk bisa menyebar semakin besar.

- Gejala awal yang dialami bersifat ringan sehingga tidapk dapat diprediksi dari awal.
- Manusia yang masih muda dan sehat bisa tidak mengalami gejala apapun, jadi penyebarannya bisa lebih cepat.
- Aktivitas manusia yang sangat cepat dan aktif sehingga penyebaran bisa lebih cepat juga (Koto, 2020).

INDIKATOR KEAMANAN SUATU DAERAH DARI COVID-19

Menurut KBBI, Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Dari definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah Indikator dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dan pemberi keterangan mengenai suatu fenomena. Indikator yang dapat mengukur kesehatan masyarakat dan keamanan suatu daerah dari COVID-19 menurut situs resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2020) dilihat dari :

1. Penurunan kasus positif di minggu terakhir sebesar $\geq$ 50% dari puncak
2. Laju Insidensi/ penambahan kasus baru menunjukan angka yang rendah atau menurun
3. Daerah memiliki *positivity rate* yang rendah
4. Rumah sakit rujukan covid telah memiliki alat medis, obat, bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan

HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEWASPADAAN PENYEBARAN COVID-19

Dalam mengatasi COVID-19 menurut Drs. Akmal Malik, M.Si yang dikutip dalam Aziz L.L, R. Siti Z, Yusuf Maulana, 2020. pemerintah pusat telah membuat pedoman manajemen dan dampaknya atas pemerintah daerah. Dalam konteks kordinasi dan pengawasan umum, beberapa langkah yang diterapkan oleh pusat telah diinfokan kepada pemerintah daerah dengan dokumen tertulis (pedoman). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa tujuan dari adanya hal tersebut adalah agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman terkait COVID-19. Sumber yang sama mengatakan, ini bukan pandemi biasa tetapi perang terhadap COVID-19. Maka dari itu, Kemendagri telah menyiapkan lima strategi, diantaranya: (a) strategi pencegahan penyebaran COVID-19; (b) peningkatan sistem kekebalan tubuh; (c) peningkatan kapasitas kesehatan; (d) peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan; (e) memperkuat jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Sumber yang sama juga menjelaskan untuk membangun pola hubungan pusat dan daerah, Kemendagri memiliki prinsip, yaitu (1)

melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah; (2) penentuan pelaksana atas urusan berbasis kriteria eksternalitas (dampak yang dirasakan), efektivitas dan akuntabilitas; (3) kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah; (4) Presiden berperan sebagai komandan tertinggi atas seluruh urusan eksekutif. Maka dari itu, saat ini telah dibuat gugus tugas untuk menangani pandemi COVID-19

Mengutip dari sumber yang sama (Prof. Dr. Eko Prasojo) menjelaskan bahwa otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan, relasi pusat-daerah merupakan *strong type* di mana pemerintah pusat memegang kendali atas manajemen penanggulangan bencana nasional wabah, seperti pembuatan regulasi, pengorganisasian, dan penyediaan kebutuhan dasar korban. Pemda dapat memberikan dukungan dalam bentuk, misalnya SDM, dana/pembiayaan, dan sumber daya lokal lainnya. Sumber yang sama juga mengatakan bahwa hukum dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan UU Pemda No. 23/2014 bahwa pemerintah pusat memberikan penyediaan kebutuhan dasar korban terdampak COVID-19 di Indonesia; membuat regulasi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan; dan melakukan korbinwas. Pemerintah provinsi memberikan dukungan penyediaan kebutuhan dasar korban terdampak COVID-19 dengan Gubernur berperan sebagai ketua satgas percepatan dan melakukan korbinwas. Sementara pemkab/pemkot memberikan dukungan penyediaan kebutuhan dasar korban terdampak COVID-19 dan Bupati/ Walikota menjadi ketua satgas percepatan.

Dalam sumber yang sama (Prof. Dr. Djohermansyah Djohan) mengatakan, pemerintah pusat seharusnya merangkul daerah untuk berkolaborasi dan berbagi beban yang berat ini di bawah kepemimpinan presiden, seperti menerima masukan dari pemda yang mengetahui lapangan, mendorong pemda merealokasi APBD, mendorong pemda untuk bersedia tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH), dan menggeser jadwal Pilkada 2020. Sumber yang sama juga mengatakan, pemda tidak boleh tinggal diam, lalai atau abai, sekalipun tidak memeliki wewenang dalam mengatasi COVID-19. Dalam hal ini, pemda harus kooperatif, memberikan saran, dan masukan kepada pemerintah pusat, dan juga mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakatnya untuk mematuhi garis kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa secara jelas dan terarah mengenai Penerapan otonomi daerah Dalam Meningkatkan Kewaspadaan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Menurut Moleong (2005:6) (dalam

Sugianto, 2020), penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Saryono (2010) (dalam Hidayat,2012), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh *social* yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami, menyelidiki, menemukan dan menjelaskan suatu kualitas dari pengaruh sosial atau fenomena yang dialami oleh subjek peneliti.

Pengertian penelitian kualitatif pendekatan studi kasus menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah *(natural setting)*. (Humas, 2017). Lalu menurut Cresswell (2010) metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (gurupendidikan, 2020). Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian kualitatif pendekatan studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang bersifat natural, karena metode ini digunakan untuk mengeksplor dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial manusia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berasal dari wawancara terstruktur dan dokumentasi (*Audio-visual* menggunakan *Zoom*). Metode pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016) (dalam Tommy, 2020)

Menurut Charles Stewart dan WB Cash (dalam Tommy, 2020), wawancara adalah wawancara adalah suatu proses interaksi dengan tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan bertukar perilaku dan melibatkan kegiatan tanya jawab. Sedangkan menurut Danzig (dalam Tommy, 2020), wawancara adalah kegiatan yang merupakan percakapan terarah dan direkam atau percakapan tatap muka, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah kegiatan atau suatu proses interaksi tanya-jawab yang memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur yang dimana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan wawancara.

Menurut Gulo (2007), dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai

kegiatan atau peristiwa pada suatu waktu. Menurut Ilham (2020), dokumentasi adalah proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah suatu catatan dan proses sistematis dalam melakukan pengumpulan dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan pada suatu peristiwa pada suatu waktu. Dokumentasi yang digunakan adalah dengan menggunakan *audio-visual* menggunakan *Zoom.*

Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2013, hal.145) subjek penelitian atau responden adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Sehingga subjek penelitian juga bertugas untuk memberikan keterangan mengenai suatu fakta ataupun pendapat yang ditanyakan. Selain itu hal ini juga dikemukakan oleh Nanang Martono (2010, hal.112) bahwa Subjek penelitian atau adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan. Maka peran subjek adalah memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Sugiyono (2018, hal.85) (dalan Islamiati D, Hendrik M, Marhadi, 2019). sampling *purposive* merupakan tata cara penentuan sampel menggunakan pertimbangan tertentu. Menurut Nursalam (2010) *purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel dengan cara menentukan beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan dari penelitian dalam sebuah populasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa teknik *purposive* sampling merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria berikut adalah kriteria yang telah ditentukan peneliti untuk memilih kelompok Informan. Kriteria ini akan menjadi landasan bagi peneliti sehingga diharapkan informan mampu memberikan informasi dengan jelas dan lengkap. Kriterianya adalah sebagai berikut: Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan ketika diberi pertanyaan mengenai COVID-19 dan otonomi daerah, Informan adalah pegawai negeri yang bekerja di pemerintah daerah kabupaten Jayapura, Selain itu ada juga Informan lain yaitu seorang yang menjadi kepala dinas tertentu dalam organisasi perangkat daerah di Jayapura

Menurut Prof. Moleong (2019), proses analisis data dimulai dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan satuan. Satuan satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Maka dari itu, dengan wawancara yang telah kita lakukan, kami mendapatkan banyak data dari wawancara tanya-jawab dengan sample kami. Setelah mendapatkan jawaban-jawaban dari sample tersebut, kami mencocokan jawaban-jawaban tersebut dengan teori-teori yang sudah diuraikan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penerapan otonomi daerah dalam meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Terdapat 4 Indikator otonomi daerah yang terdapat pada penelitian ini; (1) Transparasi pengelolaan APBD, (2) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah, (3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan masyarakat, dan (4) Menjaga Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu mengelola konflik yang ada di tengahpandemi COVID-19. Terdapat 4 Indikator keamanan suatu daerah dari COVID-19 dan yang terdapat pada penelitian ini; (1) Penurunan kasus positif di minggu terakhir sebesar $\geq$ 50% dari puncak, (2) Laju Insidensi/ penambahan kasus baru menunjukan angka yang rendah atau menurun, (3) Daerah memiliki *positivity rate* yang rendah, dan (4) Rumah sakit rujukan COVID-19 telah memiliki alat medis, obat, bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan 4 informan yang bekerja dalam perangkat daerah di Kabupaten Jayapura berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Empat orang informan yang diwawancarai terdiri dari satu orang Bupati Kabupaten Jayapura, satu orang kepala dinas kesehatan Kabupaten Jayapura, satu orang kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura, dan satu orang kepala dinas keamanan Kabupaten Jayapura. Berikut adalah kesimpulan yang peneliti interpretasi di setiap informan:

Peneliti menemukan hasil wawancara terkait pertanyaan pertama adalah Penggunaan APBD yang diinstruksikan oleh presiden untuk COVID-19 fokus untuk pengobatan dan penanganan. Tidak hanya mengandalkn APBD, pemerintah juga melakukan berbagai upaya salah satunya 3T (*tracing, test, treatment*). Namun, karena pengeluaran untuk biaya-biaya tidak terduga, seperti penyediaan makanan untuk masarakat yang karantina di rumah, Lab PCR, fasilitas rumah sakit, dan pemakaman, maka APBD yang dimiliki tidak cukup, namun pemerintah masih berusaha untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui tafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban tersebut tidak dapat memenuhi indikator pengelolaan APBD dan peningkatan Kualitas Rumah sakit rujukan.

Melalui hasil wawancara didapatkan bahwa pemerintah pusat di daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani COVID-19, contoh karantina wilayah 14 hari. Pemerintah juga menggelar beberapa pertemuan terkait hal ini. Namun semuanya balik lagi terhadap prinsip masyarakat dalam melaksanakan protokol dan juga sumber daya, sarana, prasarana. P*ositivity rate* sebenarnya dapat terkontrol jika hal-hal tersebut tercukupi, tetapi dalam hal ini Kabupaten Jayapura mengalamai cukup kekurangan. Melalui tafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban belum cukup untuk memenuhi indikator kedua, dikarenakan kebijakan pemerintah pusat tidak cukup dalam mengontrol *positivity rate*, dibutuhkan juga sumber daya, sarana, prasarana yang memadai dan dalam hal ini Kabupaten Jayapura belum mencukupi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona adalah adanya karantina mandiri, pembatasan waktu kegiatan (ibadah, belajar, bekerja) dan terdapat penerapan peraturan Bupati no 50 tahun 2020 mengenai sanksi jika terdapat orang yang tidak menyesuaikan dengan protokol kesehatan akan memberikan uang denda sebesar Rp. 50.000, -1.000.000, ada operasi yustisi untuk mendisiplinkan masyarakat dan yang melanggar mendapat sanksi berupa sanksi sosial dan uang, Adanya penyuluhan dan ada gerakan wajib “Kembali ke Kebun” untuk penguatan ekonomi dengan menanam dan berkebun sayur sehigga masyarakat dapat cukup memenuhi kebutuhan pangan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan (memakai masker, *hand-sanitizer,* cuci tangan, dll). Melalui tafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban tersebut dapat memenuhi indikator karena pelaksanaan peraturan pemerintah baik represif maupun preventif dapat berjalan untuk menekan laju angka COVID-19 sehingga masih dapat untuk dikontrol.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Jayapura *positivity rate* terkadang naik dan turun maka pemerintah Jayapura

akan terus mendorong ILM (Iklan Layanan Masyarakat) untuk kita bisa peduli terhadap kesehatan. Pemerintah pusat sejak awal akan dianggap berhasil jika berhasil memenuhi syarat seperti desentralisasi kebijakan dan intruksi dari presiden yang diturunkan ke pemerintahan darerah sangat luar biasa untuk menekan angka penyebaran COVID-19 serta kewenangan pemerintah dapat dilemparkan ke daerah sehingga daerah dapat mengambil kebijakan sendiri untuk menangani. Melalui tafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban tersebut pemerintah dapat menekan laju penyebaran COVID-19 dan peraturan pemerintah tersebut dapat berhasil untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Penggunaan ILM di Kabupaten Jayapura sudah dilakukan secara intens. ILM juga digunakan untuk mempromosikan serta melakukan tindakan preventif pada berita hoax yg tersebar mengenai COVID-19. Pemerintah sudah berupaya dengan menggunakan berbagai media yang ada seperti *website*, iklan, dan radio (bagi masyarakat yang tidak ada sinyal) agar masyarakat tidak ketinggalan informasi dan mengajak masyarakat tetap waspada dan menjaga keselamatan serta kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Berdasarkan tafsiran tersebut, maka jawaban dapat memenuhi indikator dalam meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui ILM untuk men ekan laju penambahan kasus baru.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam hal meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan masyarakat dan kebutuhan kesehatan sangat banyak. Meskipun kebutuhan-kebutuhan kesehatan belum memenuhi standar secara tinggi. Pemerintah terus berusaha dan kebutuhan tersebut sudah memenuhi standar yang sangat baik. Kebutuhan-kebutuhan rumah sakit dan kesehatan membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mudah untuk didapat, oleh karena itu pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat juga bekerja sama dengan cara menjaga jarak serta mengerti dan memahami betul-betul kondisi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil tafsiran, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban dapat memenuhi hubungan indikator covid dan otonomi daerah ke-enam oleh karena dengan usahanya pemerintah sudah membangun beberapa fasilitas kesehatan dan berusaha dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Hasil wawancara menunjukan pada aspek kesehatan yaitu pihak kesehatan dalam posisi kesiapan yang sangat minim disaat kasus pertama masuk ke dalam daerah masing-masing, ketersediaan ruang-ruang isolasi, ventilator dan peralatan vital lainnya telah tersedia sebelumnya tetapi tidak cukup sehingga, pihak rumah sakit menggunakan hotel demi menampung banyaknya orang.

Untuk penggunaan ventilator, ternyata hanya beberapa pihak yang menggunakan alat ini. Berdasarkan hasil tafsiran**,** peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban tidak dapat memenuhi indikator kedua yang berupa pelayanan kesehatan tercukupi. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum terlalu siap ketika pandemi tersebut datang sehingga fasilitas-fasilitas tidak terlalu disiapkan sesuai dengan standar kesehatan yang semestinya dalam menangani penyebaran COVID-19.

Hasil wawancara menunjukan pada aspek pendidikan yaitu bahwa Kebijakan pemerintah sudah baik dalam penerapan kebijakan pemerintah dan pusat terkait dengan pembelajaran online ini dapat efektif dalam menurunkan kasus COVID-19 tetapi tidak efektif dalam melakukan pembelajaran online karena terdapat beberapa tempat yang tidak terjangkau oleh internet dan tidak semua anak memiliki *smartphone*. Pemerintah Jayapura membuat langkah-langkah dengan cara adanya radio milik pemerintah daerah yang dimiliki oleh dinas pendidikan yang bekerja sama dengan Kominfo yang bernama "Radio Kenambai Umbai" dan setiap hari sudah ada guru yang memiliki daftar menyiar, adanya jaringan TV kabel dengan guru-guru yang membuat konten-konten video pelajaran lalu dikirim oleh jaringan TV Kabel dan disiarkan 1x24 jam. Kebijakan pemerintah terkait dunia pendidikan adalah upaya agar anak-anak itu tetap dirumah dan bisa belajar. Untuk yang tidak punya jaringan sama sekali, maka guru akan datang ke sekolah dan membuat modul untuk anak-anak. Pembelajaran dilakukan tergantung dari zona. Bila zona hijau dan kuning maka disarankan untuk masuk sekolah tetapi tetap pada protokol kesehatan. Bila zona merah maka akan tetap belajar dari rumah. Sehingga upaya pembelajaran di rumah dapat cukup efektif dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Berdasarkan hasil tafsiran, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban dapat memenuhi indikator karena dapat menekan *positivty rate* serta dapat memenuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait dengan pengubarangan penyebaran COVID-19.

Hasil wawancara menunjukkan pada aspek keamanan yaitu pihak keamanan menjaga para masyarakat agar tetap bepergian menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan, apabila ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan akan dikenakan sanksi. Pihak keamanan juga menjalankan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh pemerintah pusat dan bupati sehingga angka penyebaran COVID-19 berkurang. Selain itu pihak keamanan memastikan bahwa masyarakat memahami kondisi saat ini. Berdasarkan hasil tafsiran**,** peneliti dapat menyimpulkan bahwa jawaban tersebut bahwa pada aspek keamanan telah mempersiapkan hal-hal untuk memulai *new normal.*

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dan berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah dengan kebijakan dan upaya-upaya pencegahan yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan dalam otonomi daerah digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Dalam penanganannya APBD masih kurang karena dibutuhkannya alat *test* CPR yang sesuai dengan standar kesehatan yang paling tinggi belum tercapai. Pemerintah berupaya dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai serta keputusan-keputusan penting yang berpengaruh dalam menghadapi pandemi.

Adanya sistem otonomi yang seperti itu sebenarnya pemerintah sudah berusaha secara maksimal, seperti contoh pemenuhan fasilitas Rumah sakit, Lab PCR, ILM, dan aspek lainnya. Namun terkait dengan kesadaran masyarakat, pemerintah masih membutuhkan kerjasama yang lebih lagi, oleh karena seperti yang disebut dalam tafsiran diatas, balik lagi terhadap prinsip masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Untuk angka COVID-19 yang ada di Jayapura, presentasenya naik dan turun, seperti yang telah dijelaskan oleh Bupati Jayapura mengenai angka COVID-19 di sana. Maka dari itu kembali lagi terhadap prinsip protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat, apakah masyarakat dapat secara patuh dan konsisten menjalankan protokol kesehatan atau tidak, karena jika tidak konsisten maka angka COVID-19 di Jayapura bisa menunjukan presentase yang tidak stabil.

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan maka penulis mengajukan saran kepada berbagai pihak untuk tujuan perbaikan bersama, yaitu hendaknya masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, masyarakat juga dapat bekerja sama untuk saling menjaga kesehatan dengan melakukan dan mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2020, July 10). √ Pengertian, Tujuan, Manfaat Otonomi Daerah (Ringkas). Retrieved October 07, 2020, from https://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-manfaat-otonomi-daerah/

Anwika, Y. M. (2013, September). *Peran Pelatih Program Pelatihan Keterampilan Bermusik Dalam Meningkatkan Motivasi dan Kemandirian Musisi Jalanan*. UPI Central Library. http://repository.upi.edu/2561/1/S_PLS_0900449_Title.pdf

Ardianto K. (2020, Maret 03). Retrieved October, 25, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all

Aziz, Z. L. L. S. N. R. (2020, April 28). *Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah "Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19."* Pusat Penelitian Politik "The Central for Political Studies." http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19#:%7E:text=Menurutnya%2C%20COVID%2D19%20merupakan%20ujian,gugus%20tugas%20penanganan%20COVID%2D19.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD). (2017, July 18). *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah. http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung.

Bratakusumah , D. S., & Solihin, D. (2004). *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah* . PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiansyah, A. (2020, March 16). Apa Itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO. Retrieved November 24, 2020, from https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, May 13). Symptoms of Coronavirus. Retrieved November 24, 2020, from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Gischa, S. (2020, February 06). Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya Halaman all. Retrieved October 01, 2020, from https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah--definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all

Gischa, S. (2020, September 08). Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah Halaman all. Retrieved October 07, 2020, from https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/08/161950769/peran-pemerintah-pusat-dalam-otonomi-daerah?page=all

Gulo, W. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta : Grasindo

Gurupendidikan. (2020, September 20). Metode Penelitian Kualitatif. Retrieved November 15, 2020, from https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/

Halidi, R. (2020, April 13). Ahli Virus Sebut Covid-19 Adalah Virus Umum, Tetapi. Retrieved October 01, 2020, from https://www.suara.com/health/2020/04/13/183832/ahli-virus-sebut-covid-19-adalah-virus-umum-tetapi?page=all

Hasanah, M.. (2020, April 28). Dampak Positif dan Negatif dari Covid-19. Retrieved October 07, 2020, from https://www.kompasiana.com/mauidotulhasanah/5ea79ff4097f3621722bfdb2/dampak-positif-dan-negatif-dari-covid-19

Hidayat, A. (2012, Oktober 12). Metode Penelitian Kualitatif. Retrieved November 12, 2020, from https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html

Humas. (2017, May 13). Metode Penelitian Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus. Retrieved November 15, 2020, from https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/

I, A. (2019, February 16). 12 Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli (Lengkap). Retrieved October 01, 2020, from http://www.markijar.com/2016/06/12-pengertian-otonomi-daerah-menurut.html

Ilham, M. (2020, September 20). *Pengertian, Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah [Lengkap]*. MateriBelajar.Co.Id. https://www.materi.carageo.com/tujuan-dan-manfaat-otonomi-daerah/.

Irianto, Y. B. (2015). *1 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH*, 4–5. Retrieved November, 2, 2020. https://fdokumen.com/document/faktor-faktor-otda.html

Islamiati D, Hendrik M, Marhadi. (2019). *HUBUNGAN DISMENORE PRIMER TERHADAP AKTIVITAS OLAHRAGA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 1 BANAWA TENGAH.* Jurnal.untad.ac.id. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/PJKR/index

Koto, R. A. (2020, March 16). Mengapa Covid-19 Sangat Cepat Menyebar secara Global? Retrieved November 04, 2020, from https://www.kompasiana.com/ajuskoto/5e6f0c53097f365f075eb102/mengapa-covid-19-sangat-cepat-menyebar-secara-global

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. (2020, April 28). Webinar Desentralisasi dan Otonomi Daerah “Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19”. Retrieved November 24, 2020, from http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19

Makhfudz, M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Retrieved October 1, 2020, from kontroversi pelaksanaan otonomi daerah - yarsi academic ...academicjournal.yarsi.ac.id › article › download › pdf

Marshall, W. F. (2020, June 30). Unusual symptoms of coronavirus: What are they? Retrieved October 01, 2020, from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/coronavirus-unusual-symptoms/faq-20487367

Mutawakkil. (2020, April 5). √ *Pengertian Otonomi Daerah: Asas, Prinsip, dan Ciri-cirinya*. Penaindo.com. https://penaindo.com/pengertian-otonomi-daerah/.

Moleong, Lexy, (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed: Revisi). Bandung: Rosda.

Pratolo, S. (2011). Jurnal Akuntansi dan Investasi. *PERAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN MANAJEMEN DALAM KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA PELAYANAN PUBLIK* , *12*, 39. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/download/662/815

Redaksi, C. (2020, April 06). Simak Penjelasan WHO Soal Apa itu Corona dan Cirinya. Retrieved October 01, 2020, from https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200406090929-37-149929/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan-cirinya

Rondinelli, Dennis A. Rondinelli And G. Shabbir Cheema, (1988), “Implementing Decentralization Policies: An Introduction”, Dalam Cheema dan Rondinelli, Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, California: Sage Publications Inc.

Satuan Tugas Penanganan Covid 19. (2020, Oktober 18). Peta Risiko. Satuan Tugas Penanganan Covid-19. https://covid19.go.id/peta-risiko

Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X". *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, *5*(1), 235-240. Retrieved from https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/254

Sugianto, O. (2020, April 13). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. BINUS UNIVERSITY BANDUNG - Kampus Teknologi Kreatif. https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/.

Suhendra. (2020, September 7). *Happy Hipoxia, Gejala Syndrome Mematikan di Balik Covid-19*. CNBC Indonesia- TECH. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200907151440-37-184941/happy-hipoxia-gejala-syndrome-mematikan-di-balik-covid-19

Supriadi, M. R. (2012, January). *PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN TUNAI TERHADAP REAKSI PASAR PERIODE 2009-2010 DI BURSA EFEK INDONESIA - UPI Repository*. UPI Central Library. http://repository.upi.edu/10464/

Tommy, & *, N. (2020, July 21). *Wawancara adalah: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Manfaat, Struktur*. Kotakpintar.com. https://kotakpintar.com/pengertian-wawancara-adalah/.

Wee, S.L, Donald G.M., Javier C. (2020, Januari 30). Retrieved October, 25, 2020. From https://www.nytimes.com/2020/01/30/health/coronavirus-world-health-organization.html

Widyananda, R. F. (2020, September 10). 6 Tujuan Otonomi Daerah Beserta Kelebihan dan Kekurangannya, Wajib Diketahui Halaman 2. Retrieved October 01, 2020, from https://www.merdeka.com/jatim/6-tujuan-otonomi-daerah-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya-wajib-diketahui-kln.html?page=2

Yusron. (2020, October 31). *Pengertian Otonomi Daerah adalah: Dasar Hukum, Tujuan, Manfaatnya*. Belajar Giat. https://belajargiat.id/otonomi-daerah/.

Yusron. A (2019, December 10). Pengertian Otonomi Daerah. Retrieved September 30, 2020, from https://belajargiat.id/otonomi-daerah/

Zakky. (2020, July 24). 10+ Tujuan Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Fungsi & Penjelasan. Retrieved October 01, 2020, from https://www.zonareferensi.com/tujuan-otonomi-daerah/n F

https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1390/Bab%204%20WM.pdf?sequence=15&isAllowed=y

http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html

LAMPIRAN

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian	Variabel dan Indikator otonomi daerah	Variabel dan Indikator suatu daerah aman dari Covid	Hubungan Kedua Indikator	Pertanyaan	No
Penerapan otonomi daerah Dalam meningkatkan Kewaspadaan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura.	Pengelolaan APBD.	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, tercukupi, seperti bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien Covid-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan	Dana APBD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RS rujukan COVID-19, seperti memiliki alat medis, obat, bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan	Apakah Penggunaan APBD sudah cukup dan efektif dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, seperti mencukupi bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan **Aspek Kesehatan:** 1.Apakah pihak kesehatan dalam posisi siap disaat kasus pertama masuk ke dalam daerah masing-masing? Apakah ruang-ruang isolasi, ventilator dan peralatan vital lainnya telah tersedia sebelumnya?	1
	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah	Penurunan *Positivity Rate*	Penerapan kebijakan dari pusat yang dapat membantu daerah dalam penurunan kasus positif **Aspek pendidikan :** **1.** Adanya penerapan kebijakan pemerintah dan pusat yang bekerja	Apakah Penerapan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dapat menurunkan *Positivity rate* daerah ? **Aspek pendidikan:** 1.Apakah penerapan kebijakan pemerintah dan pusat terkait dengan pembelajaran online ini dapat efektif dalam menurunkan	2

			sama untuk mengoptimalkan dan seharusnya dapat memberik efektivitas dalam pengurangan kasus COVID-19. 2.Kebijakan pemerintah selanjutnya terkait pembelajaran jarak jauh	kasus COVID-19 tetapi tidak efektif dalam melakukan pembelajaran *online*? 2.Dalam dunia pendidikan saat ini sedang dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Apakah kebijakan pemerintah selanjutnya terkait dunia pendidikan? Apakah masih tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh walau jika daerah memiliki *positivity rate* yang rendah?	
	Pelaksanaan Pemerintah (Represif dan Preventif)	*Positivity Rate* menunjukan angka yang rendah	Kebijakan Preventif dan Represif seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengakibatkan *positivity rate* rendah	Apa saja tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona ?	3
	Pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat (*New Normal* dalam Desentralisasi Daerah)	*Positivity Rate* menunjukan angka yang rendah	Desentralisasi daerah seharusnya dapat memaksimalkan pelayanan pemerintah setempat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga angka positif rendah **Aspek keamanan**	Apakah desentralisasi pemerintah pusat terkait *new normal* dapat menekan p*ositivity rate* penularan virus ? **Aspek keamanan :** 1.Saat *new normal* belum dilaksanakan secara resmi, langkah apa saja yang dipersiapkan dan apa saja yang didiskusikan serta ekspetasi apa yang dipikirkan oleh para pemerintah? 2.Hal apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk mencegah para masyarakat terkena	4

			1.Hal-hal yang dipersiapkan untuk memulai *new normal,* untuk menjaga angka COVID-19 tetap rendah. 2.Hal yang dilakukan dalam hal keamanan saat *new normal* baru dimulai, sehingga *positivity rate* tetap rendah. 3.Saat kebijakan pemerintah untuk membuka bandara, apakah *positivity rate* tetap rendah?	COVID-19 dan bagaimana respon dari masyarakat saat *new normal* dilaksanakan? 3.Lalu saat bandara dibuka, bagaimana kesulitan dan hal apa yang sudah dilakukan agar *positivity rate* tetap rendah?	
	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan masyarakat. Hal ini bisa dikontrol dari ILM (Iklan Layanan Masyarakat)	Laju Insidensi/ penambahan kasus baru menunjukan angka yang rendah atau menurun	ILM seharusnya dapat menumbuhkan kewaspadaan masyarakat sehingga laju insidensi dapat berkurang **Aspek pendidikan:** **1.** Kebijakan pemerintah yang mengharuskan para murid untuk melakukan pembelajaran jarak jauh/*online learnin*g seharusnya bisa menekan laju insidensi angka COVID-19.	Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektvitas layanan masyarakat melalui ILM sehingga dapat menekan laju penambahan kasus baru ? **Aspek pendidikan :** 1.Apakah pembelajaran dirumah efektif dalam menekan laju insidensi angka COVID-19?	5
	Meningkatkan efisiensi dan efektivtas dalam layanan masyarakat	Rumah sakit rujukan COVID-19 telah memiliki alat medis, obat, bahan	Peran pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan masyarakat	Apakah peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivtas layanan masyarakat dapat	6

		medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan	seharusnya dapat berdampak pada pemenuhan fasilitas atau kebutuhan RS Rujukan COVID-19	memenuhi atau memperbaiki kebutuhan Rumah Sakit dalam pemenuhan alat medis, obat, bahan medis, APD, Ambulance yang sesuai dan memadai standar protokol kesehatan ?	

CATATAN HASIL WAWANCARA

NARASUMBER 1

1. Informan: Mathius Awoitauw, SE., M.Si sebagai Bupati Jayapura.

2. Waktu Wawancara: 16 November 2020 (07.00 WIB)

3. Tempat Wawancara: UPH College

4. Jalannya Wawancara: Terstruktur

No	Pertanyaan Wawancara	Deskripsi	Makna
1	Apakah Penggunaan APBD sudah cukup dan efektif dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, seperti mencukupi bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan?	Ketika terjadi *Pandemi*c dengan arahan pemerintah pusat maka perlu dilakukan upaya perubahan anggaran (dilakukan dengan pengetahuan DPR). Pemerintah Kabupaten Jayapura menyediakan anggaran sekitar 45 M-50M dari pergeseran yang sudah dilakukan dari mengurangi perangkat daerah yang tidak mendesak dan dananya dialokasikn ke COVID-19 ditambah dengan biaya tak terduga yang setiap tahun dianggarkan, tetapi tidak mencukupi dan sedikit. Dana tidak cukup dengan perkembangan COVID-19 yang tidak menentu. Pemerintah juga melakukan karantina mandiri dan pemerintah harus menyediakan bahan makanan dan segala pelayanan karena masyarakat tidak boleh keluar. Masyarakat yang karantina mandiri harus ditempat	APBD tidak cukup untuk penanganan COVID-19, karena ada beberapa biaya-biaya tidak terduga yang harus dilakukan pemerintah daerah, seperti misalnya penyediaan makanan untuk pasien karantina mandiri. Selain daripada itu, biaya paling mahal dikeluarkan adalah untuk Lab PCR yang harus sesuai dengan standar WHO dan pemakaman khusus pasien COVID-19 yang pemerintah juga harus bayar. Meskipun dana anggaran tidak cukup, pemerintah masih berusaha untuk memenuhi pelayanan kesehatan.

		dan tidak boleh ke pasar dan jalan-jalan selama 14 hari. Pemerintah yang menyediakan makanan kepada masyarakat karantina, dan hal-hal tersebut merupakan beberapa hal yang terjadi di luar perhitungan dan sekarang masih berlangsung di fasilitas alat-alat pengadaan APD, dll yang harus disediakan. paling berat adalah Lab untuk PCR dan harus sesuai WHO dan itu sangat mahal, karena harus menyediakan SDM dan fasilitas yang standar, tempat yang standart, alat standart (mahal). Di Papua hanya ada satu rumah sakit di provinsi untuk test ini sehingga di kabupaten dan kota harus antri dan hasilnya juga bisa sampai 2-3 minggu dan hal tersebut sedikit menganggu, kemudian tempat pemakaman COVID-19 harus sewa dan bayar karena harus khusus. Dana anggaran tidak cukup sebenarnya tapi kami harus tetap berjuang untuk memenuhi pelayanan kesehaan masyarakat ini.	
2	Apakah Penerapan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dapat menurunkan *positivity rate* daerah ?	Kebijakan sangat membantu dan menjadi legitimasi dalam bergerak bersama-sama untuk melawan COVID-19 yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Ada pertemuan di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, ada Posko dan Gugus tugas yang bekerja sampai tingkat kecamatan/ *district*, di kampung juga dibentuk agar bisa bergerak, secara swadaya bisa membantu gerakan bersama karena pemerintah bergerak terbatas. Jadi kita (pemerintah) menyesuaikan dengan kondisi setempat termasuk juga ketahanan pangan, masyarakat digerakan sibuk di kebun supaya jangan ke kota. Pemerintah pusat juga memberikan arahan supaya penanganan COVID-19 juga dibarengi dengan ketahanan pangan, terutama yang	Adanya penerapan kebijakan pusat di daerah dapat menjadi legitimasi dalam kami melawan COVID-19 yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Ada berbagai pertemuan yang kami laksanakan dan kami juga membentuk posko dan gugus tugas yang dibentuk untuk bisa membantu pemerintah. Pemerintah pusat juga memberikan arahan supaya penanganan COVID-19 dibarengi dengan ketahanan pangan, pemerintah juga mengarahkan masyarakat untuk bekerja di kebun dan tidak ke kota. Kebijakan pemerintah pusat membantu kami bersama untuk bergerak melawan COVID-19.

		kehilangan pekerjaan di bidang pariwisata, karena kami pernah menutup bandara sekian bulan. Semua aktvitas hotel dan restoran terganggu dan banyak yang dirumahkan maka harus ada kompensasi untuk mereka. Maka membutuhkan kebijakan pemerintah pusat untuk bagaimana upaya ini bisa sejalan dengan kebijakan bersama.	
3	Apa saja tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona?	Melakukan karantina mandiri di setiap rumah. Pasien yang sakitnya ringan dan menengah dianjurkan di rumah. Jadi bisa dengan keluarga, bisa lebih senang, damai, karena biasanya di rumah sakit lihat alat medis, pakaian APD, bisa menganggu ketenangan dalam proses penyembuhan. Sekarang di rumah sakit sedikit, tapi di rumah banyak dengan penangan seperti itu didampingin degan tim medis. Sering dikeluarkan surat edaran untuk dunia usaha dan rumah ibadah untuk mematuhi protocol dan juga kerumunan-kerumunan. Ada pos-pos pencegahan di beberapa titik baik dari zona merah ke hijau, itu harus ada pos-pos yang disediakan TNI Polri dan masyarakat untuk mengurangi orang dari zona hijau ke merah dan sebaliknya, jadi benar-benar masyarakat yang masuk bebas covid. Jika masyarakat tidak membutuhkan kepentingan tidak usah jalan-jalan. Kita juga buat peraturan Bupati tentang pelaksanaan protocol, surat edaran dan ada sanksinya juga, kalau tidak pakai masker bisa sanksi sosial dan uang. Ada operasi yustisi, ada penegakan hukum bagi mereka yang melanggar. Ada aktivitas pembatasan waktu. Awal covid aktvitas hanya sampai jam 2 siang setelah itu aktvitas berhenti, setelah 4-5 bulan balik lagi ke jam 5 sore, sekarang sampai jam 9	Ada karantina mandiri, dikeluarkan juga surat edaran untuk usaha dan rumah ibadah, ada pos-pos pencegana di beberapa titik dari zona merah ke hijau hingga hijau ke merah. Kita himbau juga masyarakat kalau tidak punya kepentingan apa-apa lebih baik di rumah saja. Ada peraturan bupati yang dibuat untuk mengatur protokol kesehatan, ada sanksinya juga. Ada operasi yustisi untuk yang melanggar, bisa berupa sanksi sosial dan uang. Pemerintah juga memberlakukan SOP tentang pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi *rapid test* massal, kita juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat ibadah untuk mensosialisasikan.

		malam, ada SOP tentang pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi dan rapid tes massal. Kita juga himbau tokoh-tokoh masyarakat di tempat ibadah untuk membantu mensosialisasikan.	
4	Apakah desentralisasi pemerintah pusat terkait *new normal* dapat menekan *positivity rate* penularan virus?	Di Jayapura kadang naik dan turun. Kadang sehari bisa 3 dan 5. Kemudian ILM terus didorong di berbagai media dengan adanya COVID-19 kita bisa lebih peduli terhadap Kesehatan. Jaga jarak penting, selama ini kita tidak tahu disekitar kita siapa saja yang kena COVID-19, tapi dengan covid ini kita diajar untuk menjaga kesehatan dengan baik dan kita bisa ajarkan terus menerus, untuk dunia Pendidikan, contoh IT bisa jadi alternatif pembelajaran. Saya lihat UPHC berhasil menerapakan daring. Kedepannya akan kami evaluasi untuk memperbaiki hal-hal.	Di Jayapura kadang naik dan turun maka dari itu kami terus dorong ILM untuk kita bisa peduli terhadap kesehatan. Kita juga harus jaga jarak dan kami akan mengevaluasi beberapa hal terkait COVID-19 untuk bisa lebih baik.
5	Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektvitas layanan masyarakat melalui ILM sehingga dapat menekan laju penambahan kasus baru?	ILM ini ada selain media umum, ada TV papua, ada media cetak, ada radio pemerintah daerah, Kabupaten Jayapura juga punya Radio Kenambai Umbai. Melalu ini kami menyebarkan informasi COVID-19 dan karena itu kami dapat penghargaan dari Lembaga pelayanan publik daerah karena Kab. Jayapura sangat intens memberi informasi dalam rangka COVID-19, baru kamis kemarin ini dari Provinsi.Termasuk juga Radio Kenambai Umbai dapat apresiasi karena Pendidikan *online* menggunakan radio, karena fasilitas di sini sangat sulit ketika belajar di rumah, mereka tidak punya a*ndroid,* dan radio ini menolong mereka, kemudian TV ada Kerjasama dengan TV kabel di beberapa tempat, anak-anak yang disekitar itu bisa berkumpul itu diorganisasikan oleh dinas Pendidikan dan PGRI, dan	ILM ada dalam bentuk media umum, TV, radio, media cetak. Jayapura punya radio bernama Kenambai Umbai untuk menyebarkan COVID-19 dan kami mendapatkan penghargaan karena kami intens menyampaikan informasi COVID-19. Tidak hanya untuk ILM kami juga pakai radio dalam bidang pendidikan karena anak-anak disini jarang yang punya *android*, hal ini dikoordinasikan oleh PGRI dan Kominfo yang ada di Jayapura.

		Kominfo yang ada di Jayapura untuk mengatur jadwal-jadwal. Ada Pendidikan dan layanan publik.	
6	Apakah peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivtas layanan masyarakat dapat memenuhi atau memperbaiki kebutuhan Rumah Sakit dalam pemenuhan alat medis, obat, bahan medis, APD, *Ambulance* yang sesuai dan memadai standar protokol kesehatan ?	Dari segi standar yang paling tinggi mungkin belom, karena rumah sakit daerah baru dikelola. Kemarin ada fasilitas baru untuk COVID-19, kita dorong jalan masuk ke situ dan seterusnya karena tidak boleh bergabung dengan aktivitas rumah sakit. Bantuan APD, kerjasama provinsi, pemerintah pusat, BNPB. Kita juga ekstra dalam memaksimalkan tenaga medis, meskipun terbatas, tapi kita coba mengundang lagi dari TNI kita minta bantuan mereka punya tenaga medis dan kepolisian, swasta-swasta yang lain, kita maksimalkan semua kekuatan yang ada. Kami tetap harus optimis, yang penting masyarakat tidak boleh panik, tidak hanya dengan upaya ini tetapi ada arahan lain untuk kondisi bisa tetap *fit*. Kemarin kami baru bantu ada 5 *ambulance* untuk bisa memperkuat pelayanan lagi. Kalo kebutuhannya standar belum, tetapi kami maksimalkan dengan partisipasi masyarakat dan pihak lainnya.	Dari segi standar yang paling tinggi belum, karena rumah sakit daerah baru dikelola. Tapi kami bantu untuk akses jalan masuk ke rumah sakit khushs COVID-19 karena tidak boleh disatukan dengan aktivitas rumah sakit lainnya. Kita juga memaksimalkan tenaga medis baik dari TNI, Polri, dan swasta. Kami juga bantuk untuk memberi 5 ambulance untuk meningkatkan pelayanan. Kami juga arahkan masyarakat untuk tetap bisa fit.

NARASUMBER 2

1. Informan: Khairul Lie S.Km, M.kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan
2. Waktu Wawancara: 17 November 2020 (07.00 WIB)
3. Tempat Wawancara: UPH College
4. Jalannya Wawancara: Terstruktur

No	Pertanyaan Wawancara	Deskripsi	Makna
1	Apakah Penggunaan APBD sudah cukup dan efektif dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, seperti	Karena dana yang dibutuhkan tidak terduga akibat bencana alam sehingga, indikator perbandingan daerah pun tidak dapat diukur. Sehingga pihak pemerintah dan para ahli pun berusaha untuk	AdanyaAPBD yang ada, pemerintah daerah pun berusaha untuk memberikan upaya berupa penanganan, pencegahan, dan penindakan. Atau yang biasa disebut

	mencukupi bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan?	mencari jalan agar dapat menangani COVID-19 ini. Selain itu juga dengan APBD yang ada, pemerintah daerah pun berusaha untuk memberikan upaya berupa penanganan, pencegahan, dan penindakan. Atau yang biasa disebut strategi 3T seperti (tracing, tes, treatment). Selain itu juga di sisi masyarakat dinas kesehatan juga diawal menerapkan 3M serta *lockdown* walaupun diterapkan karantina wilayah, pemerintah harus menyiapkan kebutuhan masyarakat, dan tunjangan APBD daerah tidak begitu mencukupi. Dan untuk pemulasaran sendiri, terdapat protokol sendiri. Orang yang memakamkan perlu untuk memakai alat pelindung level 3. namun dari beberapa pertimbangan, pemerintah pun menerapkan level 2, dan memilih alternatif lain seperti jas hujan sebagai pelindung badan agar pengunaan APBD dapat dikurangi. Lalu untuk petugas puskesmas, terdapat pelayanan khusus bagi mereka yang memiliki simtom dari COVID-19 yang juga memerlukan APBD khusus.	strategi 3T seperti (*tracing, test, treatmen*t). Selain itu juga di sisi masyarakat dinas kesehatan juga diawal menerapkan 3M serta *lockdown* walaupun diterapkan karantina wilayah, pemerintah harus menyiapkan kebutuhan masyarakat, dan tunjangan APBD daerah tidak begitu mencukupi.
2.	**Aspek Kesehatan:** Apakah pihak kesehatan dalam posisi siap disaat kasus pertama masuk ke dalam daerah masing-masing? Apakah ruang-ruang isolasi, ventilator dan peralatan vital lainnya telah tersedia sebelumnya?	Dengan kesiapan yang cukup minim sehingga ketersediaan ruangan isolasi sebelumnya, tidak cukup sehingga, pihak rumah sakit menggunakan hotel demi menampung banyaknya orang. Namun setelah beberapa lama, isolasi pun ditetapkan di dalam rumah, (terbukti efektif dengan pasien yang hanya berjumlah 6 orang) karena secara psikologis dan tingkat penyebaran pun lebih baik daripada suasana rumah sakit. Lalu juga dalam penggunaan ventilator, ternyata hanya beberapa pihak yang menggunakan alat ini, akibat mayoritas memiliki gejala yang bersifat ringan-sedang.	Ketersediaan ruangan isolasi sebelumnya, tidak cukup sehingga, pihak rumah sakit menggunakan hotel demi menampung banyaknya orang. Untuk penggunaan ventilator, ternyata hanya beberapa pihak yang menggunakan alat ini.
3.	Apakah Penerapan Kebijakan Pemerintah	Penerapan kebijakan pada saat ini membuat total pasien yang	Sehingga balik lagi, semuanya balik lagi terhadap prinsip

	Pusat di Daerah dapat menurunkan *positivity rate* daerah ?	sembuh : pasien yang terjangkit virus adalah sekitar 501 orang dinyatakan sembuh: 675 masih dirawat dengan persentase 74%. Penerapan 3M & 3T bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Namun dibalik itu terdapat beberapa kendala, seperti pengambilan *test* yang diwajibkan RT-PCR ini, pemerintah memiliki kekurangan. Prinsip dari penanganan penyakit menular adalah dengan isolasi. Namun keberadaan laboratorium untuk pengecekan sampel tidak tersedia di dalam daerah, dan perlu dilaporkan ke bagian provinsi. Sehingga kabupaten pun harus mengalami kendala dalam tes dan *tracing* akibat menunggu selama 7-14 hari demi mendapatkan hasil (keterlambatan). *Positivity rate* pun dapat dikontrol jika sumber daya sarana prasarana tercukupi, dan Kabupaten Jayapura mengalami cukup kekurangan.	masyarakat dalam melaksanakan protokol. Prinsip dari penanganan penyakit menular adalah dengan isolasi. *Positivity rate* pun dapat dikontrol jika sumber daya sarana prasarana tercukupi, dan Kabupaten Jayapura mengalami cukup kekurangan.
4.	Apa saja tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona ?	Tindakan preventif dan represif pada awal pandemi, diterapkan dengan adanya karantina wilayah tertentu. Kemudian juga diperlakukannya pelaku perjalanan bagi yang keluar dan masuk dari ke Jayapura, lalu juga ada pos pengawasan yang berguna bagi orang-orang dalam melaksanakan setiap kegiatan ke suatu wilayah, perlu untuk melaporkan hal ini kepada pihak pos. Kemudian juga terdapat penerapan peraturan bupati no. 50 tahun 2020 mengenai sanksi jika terdapat orang yang tidak menyesuaikan dengan protokol kesehatan akan memberikan uang denda sebesar Rp.50.000,-1.000.000, termasuk operasi yustisi untuk mendisplinkan masyarakat yang memiliki jam aktivitas. Awalnya dari jam 2 siang hingga preventif jam 9 malam. Lalu terdapat peraturan izin peringatan seperti acara dan kegiatan lainnya yang	Tindakan preventif dan represif pada awal pandemi, diterapkan dengan adanya karantina wilayah tertentu, diperlakukannya pelaku perjalanan bagi yang keluar dan masuk dari ke jayapura dan terdapat penerapan peraturan bupati no. 50 tahun 2020 mengenai sanksi jika terdapat orang yang tidak menyesuaikan dengan protokol kesehatan akan memberikan uang denda sebesar Rp.50.000,-1.000.000, termasuk operasi yustisi untuk mendisplinkan masyarakat yang memiliki jam aktivitas dan ada sosialisasi serta perlakuan *rapid tes*t secara massal agar percepatan keamanan.

		memerlukan laporan. Lalu yang terakhir ada sosialisasi serta perlakuan *rapid test* secara massal agar percepatan keamanan.	
5.	Apakah desentralisasi pemerintah pusat terkait new normal dapat menekan *positivity rate* penularan virus ?	Upaya pemerintah pusat bisa efektif tergantung dari pengawasan. Pemerintah pusat sejak awal akan dianggap berhasil jika berhasil untuk memenuhi syarat seperti desentralisasi kebijakan yang juga diikuti dengan bagian keuangan, pengawasan termasuk undang-undang.	Pemerintah pusat sejak awal akan dianggap berhasil jika berhasil untuk memenuhi syarat seperti desentralisasi kebijakan yang juga diikuti dengan bagian keuangan, pengawasan termasuk undang-undang.
6.	Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektvitas layanan masyarakat melalui ILM sehingga dapat menekan laju penambahan kasus baru?	Dalam gugus tugas, kominfo juga mempromosikan serta melakukan preventif pada berita *hoax* yang tersebar terkait virus *Corona* yang tersebar. Selain itu pemerintah juga melakukan lintas-lintas sektor agar masyarakat melek dengan informasi. Dan dalam memberikan pemahaman dari virus tersebut, pemerintah juga fokus untuk mengaktifkan penyebaran info kepada masyarakat daerah yang lebih rawan dengan penyebaran *hoax* ini. Hal ini ini dianggap efektif karena dapat dilihat dari 40% orang yang terjangkit virus dan tidak menunjukkan gejala lalu dinyatakan positif, jarang menggunakan masker, sehingga laju kasus baru pun kemungkinan dapat meningkat.	Sisi-sisi dari iklan layanan masyarakat telah pemerintah usahakan agar dapat dikendalikan dan tidak merugikan pihak pemerintah. kominfo juga mempromosikan serta melakukan preventif pada berita *hoax* yang tersebar terkait virus Corona yang tersebar. Selain itu pemerintah juga melakukan lintas-lintas sektor agar masyarakat melek dengan informasi.
7.	Apakah peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivtas layanan masyarakat dapat memenuhi atau memperbaiki kebutuhan Rumah Sakit dalam pemenuhan alat medis, obat, bahan medis, APD, *Ambulance* yang sesuai dan memadai standar protokol kesehatan ?	Pemerintah ini seperti pada penjelasan awal, telah disiapkannya alat medis, APD dan alat kesehatan lainnya dengan lengkap dengan penyesuaian tunjangan APBD yang terbatas Sehingga karena keadaan yang darurat, pemerintah perlu melakukan beberapa pengalihan, termasuk penerapan ruang isolasi guna menampung pasien yang terjangkit virus di sarana lain (hotel).	Walaupun memiliki kendala dalam penggalangan APBD, namun terkait kebutuhan rumah sakit dalam pemenuhan alat media APD dan hal lainnya telah berhasil pemerintah daeerah sesuaikan demi menunjang layanan kesehatan ini.

NARASUMBER 3

1. Informan: Teed J. Mokay S.Sos, M.Si sebagai Dinas Pendidikan
2. Waktu Wawancara: 18 November 2020 (08.45 WIB)
3. Tempat Wawancara: UPH College
4. Jalannya Wawancara: Terstruktur

No	Pertanyaan Wawancara	Deskripsi	Makna
1	Apakah Penggunaan APBD sudah cukup dan efektif dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, seperti mencukupi bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan?	Ada kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah. Bupati mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kabupaten menyediakan kebijakan untuk menyediakan anggaran untuk menyiapkan mengenai COVID-19 untuk medis. Keuangan daerah yang tidak terlalu dipakai ada beberapa yang diambil untuk menangani pengobatan. Ada langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. APBD digunakan untuk menangani pengobatan dan pencegahan COVID-19.	Keuangan daerah yang tidak terlalu dipakai ada beberapa yang diambil untuk menangani pengobatan. APBD digunakan untuk menangani pengobatan dan pencegahan COVID-19.
2	Apakah Penerapan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dapat menurunkan *positivity rate* daerah ?	Pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan kebijakan ke daerah agar bisa mencegah penyebaran COVID-19. Di pendidikan terdapat edaran menteri pendidikan untuk dana post yang bisa digunakan untuk menangani masalah pendidikan berkaitan dengan *online learning* dan karantina di rumah dengan memberikan pulsa untuk guru dan siswa. Untuk anak-anak yang tidak memiliki HP, digunakan dana post untuk membiayai transport untuk guru datang kerumah siswa.	Pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan kebijakan ke daerah agar bisa mencegah penyebaran COVID-19. Adanya edaran dari menteri pendidikan untuk menangani masalah pendidikan berkaitan dengan *online learning* dan karantina di rumah dengan menggunakan dana post untuk membiayai dan memberikan fasilitas.
3	**Aspek Pendidikan:** Apakah penerapan kebijakan pemerintah dan pusat terkait dengan pembelajaran online ini dapat efektif dalam menurunkan kasus COVID-19 tetapi tidak efektif dalam melakukan pembelajaran *online*?	Kebijakan sudah baik, cuman ada beberapa tempat yang tidak terjangkau oleh internet dan tidak semua anak memiliki *smartphone*. Pemerintah Jayapura mencoba untuk meminimalisir anak-anak Jayapura dapat untuk belajar. Ada langkah pertama yaitu dengan adanya Radio milik pemerintah daerah yang dimiliki oleh dinas pendidikan yang bekerja sama dengan kominfo yang bernama “Radio Kenambai Umbai” dan setiap	Kebijakan sudah baik, cuman ada beberapa tempat yang tidak terjangkau oleh internet dan tidak semua anak memiliki *smartphone*. Pemerintah Jayapura membuat langkah-langkah dengan cara adanya Radio milik pemerintah daerah yang dimiliki oleh dinas pendidikan yang bekerja

		hari sudah ada guru yang memiliki daftar menyiar. Mulai dari jam 9-11 pagi, adanya jaringan TV kabel dengan guru-guru yang membuat konten-konten video pelajaran lalu dikirim oleh jaringan TV Kabel dan disiarkan 1x24 jam. Upaya agar anak-anak itu tetap dirumah dan bisa belajar. Untuk yang tidak punya jaringan sama sekali, maka guru akan datang ke sekolah dan membuat modul untuk anak-anak.	sama dengan kominfo yang bernama "Radio Kenambai Umbai" dan setiap hari sudah ada guru yang memiliki daftar menyiar. adanya jaringan TV kabel dengan guru-guru yang membuat konten-konten video pelajaran lalu dikirim oleh jaringan TV Kabel dan disiarkan 1x24 jam. Upaya agar anak-anak itu tetap dirumah dan bisa belajar. Untuk yang tidak punya jaringan sama sekali, maka guru akan datang ke sekolah dan membuat modul untuk anak-anak.
4	**Aspek Pendidikan:** Dalam dunia pendidikan saat ini sedang dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Apakah kebijakan pemerintah selanjutnya terkait dunia pendidikan? Apakah masih tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh walau jika daerah memiliki *positivity rate* yang rendah?	Di kota yang kategori merah, maka anak-anak tidak sekolah dan belajar dirumah. Tetapi di titik yang jauh dari kota yang zona hijau dan kuning, maka mereka dianjurkan untuk tetap belajar seperti biasa dengan catatan tidak boleh batas melebihi yang telah diaturkan. (per kelas hanya boleh berisi 50% orang). Adanya pembagian jadwal yang teratur dan yang penting orangtua memberikan ijin anaknya ke sekolah, bila tidak diijinkan maka guru akan memberikan pengertian kepada orangtua.	Pembelajaran dilakukan tergantung dari zona. Bila zona hijau dan kuning maka disarankan untuk masuk sekolah tetapi tetap pada protokol kesehatan. Bila zona merah maka akan tetap belajar dari rumah.
5	Apa saja tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona?	Ada kebijakan untuk pembatasan waktu dimana masyarakat diberikan waktu untuk beraktivitas (dari pagi-2 siang) dan bekerja dari rumah, 50% bekerja dirumah 50% bekerja dikantor, aktivitas ibadah dilakukan dengan metode daring, aktifitas warung makan, dll dibatasi dari jam 2-5 sore. Adanya penyuluhan ke kampung dan ada gerakan wajib "Kembali ke Kebun" untuk penguatan ekonomi dengan menanam dan berkebun sayur sehigga masyarakat dapat cukup memenuhi kebutuhan pangan agar masyarakat tidak perlu ke kota dan ke pasar. Wajib untuk memakai masker, dan disediakan *hand-sanitizer*, tempat cuci tangan. Adanya peraturan Bupati yang dikeluarkan dan diterapkan.	Ada kebijakan untuk pembatasan waktu masyarakat yaitu dalam melakukan aktivitas, bekerja dari rumah atau kantor, ibadah, belajar atau bersekolah. Adanya penyuluhan dan ada gerakan wajib "Kembali ke Kebun" untuk penguatan ekonomi dengan menanam dan berkebun sayur sehigga masyarakat dapat cukup memenuhi kebutuhan pangan agar masyarakat tidak perlu ke kota dan ke pasar. Wajib untuk memakai masker, dan disediakan *hand-sanitizer*, tempat cuci tangan.

6	Apakah desentralisasi pemerintah pusat terkait new normal dapat menekan *positivity rate* penularan virus ?	Pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Kewenangan-kewenangan pemerintah tidak perlu diatur di pusat dan kalau bisa dilemparkan ke daerah sehingga daerah bisa mengambil kebijakan sendiri untuk menangani.	Kewenangan-kewenangan pemerintah tidak perlu diatur di pusat dan kalau bisa dilemparkan ke daerah sehingga daerah bisa mengambil kebijakan sendiri untuk menangani.
7	Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektvitas layanan masyarakat melalui ILM sehingga dapat menekan laju penambahan kasus baru ?	Pemerintah menggunakan berbagai media dengan modul atau tablet yang dipajang dimana-mana untuk mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan serta kesehatan.	Pemerintah menggunakan media atau Iklan Layanan Masyarakat untuk mengajak masyarakat tetap waspada dan menjaga keselamatan serta kesehatan.
8	**Aspek Pendidikan:** Apakah pembelajaran dirumah efektif dalam menekan laju insidensi angka COVID-19?	Pembelajaran dirumah merupakan upaya nasional dan dunia. Upaya yang kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi aktivitas keramaian. Ada baiknya pemerintah mengurangi resiko. Pembelajaran dirumah dapat cukup efektif dalam mengurangi penyebaran COVID-19.	Upaya Pembelajaran dirumah dapat cukup efektif dalam mengurangi penyebaran COVID-19.
9	Apakah peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivtas layanan masyarakat dapat memenuhi atau memperbaiki kebutuhan Ruma Sakit dalam pemenuhan alat medis, obat, bahan medis, APD, Ambulance yang sesuai dan memadai standar protokol kesehatan?	Ada kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan dengan tujuan supaya pelayanan di rumah sakit, puskesmaa itu cukup untuk bisa menangani COVID-19. Pemerintah tetap berupaya untuk memenuhi standar yang bagus untuk masyarakat. Masyarakat juga diberi kesadaran, misalnya dengan mendapat sanksi jika tidak memakai masker, dll. Dibutuhkan waktu yang memang lama untuk mempersiapkan yang sangat memadai.	Ada kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan dengan tujuan supaya pelayanan kesehatan dan pengobatan. Pemerintah tetap berupaya untuk memenuhi standar yang bagus untuk masyarakat. Masyarakat juga diberi kesadaran,

NARASUMBER 4

1. Informan: Iwan

2. Waktu Wawancara: 19 November 2020 (08.45 WIB)

3. Tempat Wawancara: UPH College

4. Jalannya Wawancara: Terstruktur

No	Pertanyaan Wawancara	Deskripsi	Makna
1	Apakah Penggunaan APBD sudah cukup dan efektif dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, seperti mencukupi bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan?	Kalau menurut pandangan dari Pak Iwan sendiri pemakaian APBD itu harus. Karena intruksi dari presiden, harus menggunakan APBD, jadi kita mengikuti aturan dari presiden sampai dengan sekarang. Karena itu adalah perintah dari pemerintah pusat.	Penggunaan APBD yang sangat diharuskan karena itu adalah sebuah intruksi dari presiden sendiri.
2	Apakah Penerapan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dapat menurunkan *positivity rate* daerah?	Kebijakan yang diturunkan pemerintah daerah, misalnya karantina wilayah, saat COVID-19 disitu banyak penyebaran, maka diadakan karantina wilayah selama 14 hari. Setelah dinyatakan aman 14 hari, daerah tersebut dibuka kembali dan diadakan evaluasi.	Adanya kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah daerah. Misalnya dengan karantina wilayah selama 14 hari.
3	Apa saja tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona ?	Kegiatan yang dilakukan secara preventif, itu seperti pembatasan waktu, kemudian sanksi-sanksi untuk yang tidak mematuhi ketentuan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya sewaktu itu kami melakukan tindakan-tindakan kepada orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misal kita melakukan operasi yustisi, operasi ini untuk menyadarkan masyarakat mengenai protokol kesehatan. Jika tidak mematuhi, kita beri sanksi dengan diingati sekali dua kali, lalu jika masih tetap seperti itu kami beri sanksi dengan membersihkan tempat kami mengadakan operasi yustisi.	Adanya kegiatan preventif yang dilakukan yaitu dengan adanya pembatasan waktu dan juga sanksi-sanksi untuk masyarakat atau warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan.

4	Apakah desentralisasi pemerintah pusat terkait new noral dapat menekan *positivity rate* penularan virus ?	Intruksi presiden dengan ke pemerintah daerah itu sangat luar biasa. Dia menekan untuk angka penyebaran COVID-19 dan tidak terjadi hal lain seperti meninggal dunia dan itu sangat kecil yang terjadi di daerah Jayapura.	Intruksi dari presiden ketika diturunkan ke pemerintah daerah sangat luar biasa dan itu membuat adanya penekanan angka penyebaran COVID-19.
5	**Aspek Keamanan:** Saat *new normal* belum dilaksanakan secara resmi, langkah apa saja yang dipersiapkan dan apa saja yang didiskusikan serta ekspetasi apa yang dipikirkan oleh para pemerintah?	Saat *New Normal* itu harus sesuai dengan dinas kesehatan, adanya pembatasan waktu dan lainnya. Setelah *new normal* dimulai, kita kembali ke 3M. Dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dilarang berkerumun dan itulah yang dilakukan saat *new normal* dimulai.	Saat *new normal* baru ingin dimulai, hal ini harus disetujui dan sesuai dengan dinas kesehatan. Seperti adanya pembatasan waktu bertemu, atau 3M.
6	**Aspek Keamanan:** Hal apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk mencegah para masyarakat terkena COVID-19 dan bagaimana respon dari masyarakat saat *new normal* dilaksanakan?	Kalau dari respon masyarakat sendiri, mereka memang sudah memahami tentang COVID-19, kemudian banyak masyarakat yang juga mengerti dan memahami kondisi COVID-19 sekarang ini. Khususnya mungkin untuk masyarakat yang belum memahami, dari pihak kesehatan memberikan edukasi sehingga masyarakat bisa lebih mengerti dan memahaminya.	Kalau melihat respon masyarakat jayapura, mereka semua sudah memahami dan mnegerti kondisi sekarang karena adanya COVID-19. Namun untuk masyarakat yang belum teredukasi dengan baik, bisa dibantu dengan pihak kesehatan sendiri yang memberikan edukasi.
7	**Aspek Keamanan:** Lalu saat bandara dibuka, bagaimana kesulitan dan hal apa yang sudah dilakukan agar *positivity rate* tetap rendah?	Selama ini, dari pemerintah daerah, pak bupati sendiri juga mengatakan kalau penerbangan antar lintas kabupaten dan provinsi, dibuat sebuah kebijakan dengan surat ijin keluar masuk. Setelah diadakan evaluasi dan sebagainya, pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi terhadap bandara, jadi harus ada persyaratan yang dipenuhi oleh pemerintah daerah, seperti SIKM dan surat keterangan rapid untuk penduduk kabupaten Jayapura. Namun apabila dari luar Papua, harus menggunakan swab. Lalu juga disaat transportasi bandara dibuka, harus melalui beberapa tahap, yaitu jika ada penduduk dari pulau Jawa atau dari luar pulau Papua lainnya harus melaporkan diri ke posko Indo dan diadakan karantina selama 14 hari.	Untuk pembukaan bandara sangat tidak mudah, membutuhkan waktu yang panjang dan setelah bandara sudah dibuka, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan SIKM, dan surat keterangan rapid atau swb test.
8	Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan	Ada sebuah website yang dibagikan kepada seluruh masyarakat, bahkan	Banyak sekali website yang bisa diakses oleh

	efektvitas layanan masyarakat melalui ILM sehingga dapat menekan laju penambahan kasus baru?	sampai ke distrik atau ke tempat yang mendapat sinyal. Untuk yang tidak dapat sinyal, kita gunakan radio. Jadi semua dipastikan dapat menjangkau mengenai covid-19 ini. Tambahan lainnya di facebook dan juga pendidikan juga diajarkan, yaitu pelajaran melalui televisi yang bernama sentral TV.	masyarakat Papua. Bahkan untuk masyarakat yang tidak mendapat sinyal, diakali dengan menggunakan radio.
9	Apakah peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivtas layanan masyarakat dapat memenuhi atau memperbaiki kebutuhan Ruma Sakit dalam pemenuhan alat medis, obat, bahan medis, APD, Ambulance yang sesuai dan memadai standar protokol kesehatan ?	Jadi semisal adanya orang yang terkena dan bagaimana agar warga tersebut bisa tetap kerja dan diminta untuk bekerja dari rumah. Lalu untuk koordinasi bisa melalui telepon dan ada juga website kesehatan, pelayanan masyarakat, dan lainnya. Semua disediakan oleh pemerintah daerah Jayapura.	Peran pemerintah tentu sangat banyak dan tentu kami meminta kerjasama dari warga sendiri, banyaknya hal yang dipersiapkan oleh pemerintah Jayapura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

CATATAN STUDI DOKUMENTASI

NO	DESKRIPSI
1	*Zoom* wawancara Kepala Gugus Posko, Dinas Keseharan, Dinas Pendidikan dan Dinas Keamanan (di dalam 1 folder) : https://ypph-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/edy_prasetyo_uphcollege_com/Eq7zvf7IlypKluixHq3i4KEBRTV8fYxj8fVgFTUhZMfBiQ?e=58rkPl

PROSES TRIANGULASI INFORMAN

Indikator X1-Y1: Apakah Penggunaan APBD sudah cukup dan efektif dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah, seperti mencukupi bahan medis, APD, ambulans, pelayanan kesehatan lainnya hingga pemulasaran jenazah (jika pasien COVID-19 meninggal) yang memadai dan sesuai dengan standar protokol kesehatan?

Narasumber				**Tafsiran**
Mathius Awoitauw S.E, M.Si	Khairul Lie S.km, M.Kes	Teed J. Mokay S.Sos, M.Si	Wahyu Kuncoro	
APBD tidak cukup untuk penanganan COVID-19, karena ada beberapa biaya-biaya tidak	AdanyaAPBD yang ada, pemerintah daerah pun berusaha untuk memberikan upaya	Keuangan daerah yang tidak terlalu dipakai ada beberapa yang diambil untuk	Penggunaan APBD yang sangat diharuskan karena itu adalah sebuah intruksi	Penggunaan APBD yang diinstruksikan oleh presiden untuk

terduga yang harus dilakukan pemerintah daerah, seperti misalnya penyediaan makanan untuk pasien karantina mandiri. Selain daripada itu, biaya paling mahal dikeluarkan adalah untuk Lab PCR yang harus sesuai dengan standar WHO dan pemakaman khusus pasien COVID-19 yang pemerintah juga harus bayar. Meskipun dana anggaran tidak cukup, pemerintah masih berusaha untuk memenuhi pelayanan kesehatan.	berupa penanganan, pencegahan, dan penindakan. Atau yang biasa disebut strategi 3T seperti (*tracing, tes, treatment)*. Selain itu juga di sisi masyarakat dinas kesehatan juga diawal menerapkan 3M serta *lockdown* walaupun diterapkan karantina wilayah, pemerintah harus menyiapkan kebutuhan masyarakat, dan tunjangan APBD daerah tidak begitu mencukupi.	menangani pengobatan. APBD digunakan untuk menangani pengobatan dan pencegahan COVID-19.	dari presiden sendiri.	penanganan COVID-19 fokus untuk pengobatan dan penanganan. Tidak hanya mengandalkn APBD, pemerintah juga melakukan berbagai upaya salah satunya 3T (tracing, test, treatment). Namun, karena pengeluaran untuk biaya-biaya tidak terduga, seperti penyediaan makanan untuk masarakat yang karantina di rumah, Lab PCR, fasilitas rumah sakit, dan pemakaman, maka APBD yang dimiliki tidak cukup, namun pemerintah masih berusaha untuk memenuhi pelayanan kesehatan.

Indikator X2-Y2 : Apakah Penerapan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dapat menurunkan *positivity rate* daerah?

Narasumber				**Tafsiran**
Mathius Awoitauw S.E, M.Si	Khairul Lie S.km, M.Kes	Teed J. Mokay S.Sos, M.Si	Wahyu Kuncoro	

Adanya penerapan kebijakan pusat di daerah dapat menjadi legitimasi dalam kami melawan COVID-19 yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Ada berbagai pertemuan yang kami laksanakan dan kami juga membentuk posko dan gugus tugas yang dibentuk untuk bisa membantu pemerintah. Pemerintah pusat juga memberikan arahan supaya penanganan COVID-19 dibarengi dengan ketahanan pangan, pemerintah juga mengarahkan masyarakat untuk bekerja di kebun dan tidak ke kota. Kebijakan pemerintah pusat membantu kami bersama untuk bergerak melawan COVID-19.	Sehingga balik lagi, semuanya balik lagi terhadap prinsip masyarakat dalam melaksanakan protokol. Prinsip dari penanganan penyakit menular adalah dengan isolasi. *Positivity rate* pun dapat dikontrol jika sumber daya sarana prasarana tercukupi, dan kabupaten Jayapura mengalami cukup kekurangan.	Pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan kebijakan ke daerah agar bisa mencegah penyebaran COVID-19. Adanya edaran dari menteri pendidikan untuk menangani masalah pendidikan berkaitan dengan *online learning* dan karantina di rumah dengan menggunakan dana post untuk membiayai dan memberikan fasilitas.	Adanya kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah daerah. Misalnya dengan karantina wilayah selama 14 hari.	Pemerintah Pusat di Daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani COVID-19, contoh karantina wilayah 14 hari. Pemerintah juga menggelar beberapa pertemuan terkait hal ini. Namun semuanya balik lagi terhadap prinsip masyarakat dalam melaksanakan protokol dan juga sumber daya, sarana, prasarana. *positivity rate* sebenarnya dapat terkontrol jika hal-hal tersebut tercukupi, tetapi dalam hal ini Kabupatena Jayapuran mengalamai cukup kekurangan.

Indikator X3-Y3 : Apa saja tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona?

Narasumber				**Tafsiran**
Mathius Awoitauw S.E, M.Si	Khairul Lie S.km, M.Kes	Teed J. Mokay S.Sos, M.Si	Wahyu Kuncoro	
Ada karantina mandiri, dikeluarkan juga surat edaran untuk usaha dan rumah ibadah, ada pos-pos pencegana di beberapa titik dari zona merah ke hijau hingga hijau ke merah. Kita himbau juga masyarakat kalau tidak punya kepentingan apa-apa lebih baik di rumah saja. Ada peraturan bupati yang dibuat untuk mengatur protokol kesehatan, ada sanksinya juga. Ada operasi yustisi untuk yang melanggar, bisa berupa sanksi sosial dan uang. Pemerintah juga memberlakukan SOP tentang pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi *rapid test massal*, kita juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat ibadah untuk mensosialisasikan.	Tindakan preventif dan represif pada awal pandemi, diterapkan dengan adanya karantina wilayah tertentu, diperlakukannya pelaku perjalanan bagi yang keluar dan masuk dari ke Jayapura dan terdapat penerapan peraturan bupati no. 50 tahun 2020 mengenai sanksi jika terdapat orang yang tidak menyesuaikan dengan protokol kesehatan akan memberikan uang denda sebesar Rp.50.000,- 1.000.000, termasuk operasi yustisi untuk mendisplinkan masyarakat yang memiliki jam aktivitas dan ada sosialisasi serta perlakuan *rapid test* secara massal agar percepatan keamanan	Ada kebijakan untuk pembatasan waktu masyarakat yaitu dalam melakukan aktivitas, bekerja dari rumah atau kantor, ibadah, belajar atau bersekolah. Adanya penyuluhan dan ada gerakan wajib "Kembali ke Kebun" untuk penguatan ekonomi dengan menanam dan berkebun sayur sehigga masyarakat dapat cukup memenuhi kebutuhan pangan agar masyarakat tidak perlu ke kota dan ke pasar. Wajib untuk memakai masker, dan disediakan *hand-sanitizer*, tempat cuci tangan.	Adanya kegiatan preventif yang dilakukan yaitu dengan adanya pembatasan waktu dan juga sanksi-sanksi untuk masyarakat atau warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan.	Tindakan preventif dan represif yang telah diambil pemerintah dalam usahanya menurunkan presentase positif virus Corona adalah adanya karantina mandiri, pembatasan waktu kegiatan (ibadah, belajar, bekerja) terdapat penerapan peraturan Bupati no 50 tahun 2020 mengenai sanksi jika terdapat orang yang tidak menyesuaikan dengan protokol kesehatan akan memberikan uang denda sebesar Rp. 50.000,- 1.000.000, ada operasi yustisi untuk mendisiplinkan masyarakat dan yang melanggar mendapat sanksi berupa sanksi sosial dan uang, Adanya penyuluhan dan ada gerakan wajib "Kembali ke Kebun" untuk penguatan ekonomi dengan

				menanam dan berkebun sayur sehigga masyarakat dapat cukup memenuhi kebutuhan pangan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan (memakai masker, *hand-sanitizer,* cuci tangan, dll).

Indikator X4-Y4: Apakah desentralisasi pemerintah pusat terkait *new normal* dapat menekan *positivity rate* penularan virus?

Narasumber				**Tafsiran**
Mathius Awoitauw S.E, M.Si	Khairul Lie S.km, M.Kes	Teed J. Mokay S.Sos, M.Si	Wahyu Kuncoro	
Di Jayapura kadang naik dan turun maka dari itu kami terus dorong ILM untuk kita bisa peduli terhadap kesehatan. Kita juga harus jaga jarak dan kami akan mengevalusi beberapa hal terkait COVID-19 untuk bisa lebih baik.	Pemerintah pusat sejak awal akan dianggap berhasil jika berhasil untuk memenuhi syarat seperti desentralisasi kebijakan yang juga diikuti dengan bagian keuangan, pengawasan termasuk undang-undang.	Kewenangan-kewenangan pemerintah tidak perlu diatur di pusat dan kalau bisa dilemparkan ke daerah sehingga daerah bisa mengambil kebijakan sendiri untuk menangani.	Intruksi dari presiden ketika diturunkan ke pemerintah daerah sangat luar biasa dan itu membuat adanya penekanan angka penyebaran COVID-19.	Di Jayapura *positivity rate* terkadang naik dan turun maka pemerintah Jayapura akan terus mendorong ILM untuk kita bisa peduli terhadap kesehatan. Pemerintah pusat sejak awal akan dianggap berhasil jika berhasil memenuhi syarat seperti desentralisasi kebijakan dan intruksi dari presiden yang diturunkan ke pemerintahan darerah sangat luar biasa untuk menekan angka penyebaran COVID-19 serta kewenangan pemerintah dapat

				dilemparkan ke dareah sehingga daerah dapat mengambil kebijakan sendiri untuk menangani.

Indikator X5-Y5 : Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektvitas layanan masyarakat melalui ILM sehingga dapat menekan laju penambahan kasus baru?

Narasumber				**Tafsiran**
Mathius Awoitauw S.E, M.Si	Khairul Lie S.km, M.Kes	Teed J. Mokay S.Sos, M.Si	Wahyu Kuncoro	
ILM ada dalam bentuk media umum, TV, radio, media cetak. Jayapura punya radio bernama Kenambai Umbai untuk menyebarkan COVID-19 dan kami mendapatkan penghargaan karena kami intens menyampaikan informasi COVID-19. Tidak hanya untuk ILM kami juga pakai radio dalam bidang pendidikan karena anak-anak disini jarang yang punya andorid, hal ini dikoordinasikan oleh PGRI dan Kominfo yang ada di Jayapura.	Sisi-sisi dari iklan layanan masyarakat telah pemerintah usahakan agar dapat dikendalikan dan tidak merugikan pihak pemerintah. kominfo juga mempromosikan serta melakukan preventif pada berita *hoax* yang tersebar terkait virus Corona yang tersebar. Selain itu pemerintah juga melakukan lintas-lintas sektor agar masyarakat melek dengan informasi.	Pemerintah menggunakan media atau Iklan Layanan Masyarakat untuk mengajak masyarakat tetap waspada dan menjaga keselamatan serta kesehatan.	Banyak sekali *website* yang bisa diakses oleh masyarakat Papua. Bahkan untuk masyarakat yang tidak mendapat sinyal, diakali dengan menggunakan radio.	Penggunaan ILM di Jayapura sudah intens. ILM juga digunakan untuk mempromosikan serta melakukan tindakan preventif pada berita hoax yg tersebar mengenai COVID-19. Pemerintah sudah berupaya dengan menggunakan berbagai media yang ada seperti radio (bagi masyarakat yang tidak ada sinyal) agar masyarakat tidak ketinggalan informasi.

Indikator X6-Y6: Apakah peran pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivtas layanan masyarakat dapat memenuhi atau memperbaiki kebutuhan Rumah Sakit dalam pemenuhan alat medis, obat, bahan medis, APD, Ambulance yang sesuai dan memadai standar protokol kesehatan?

Narasumber **DIAMBIL DARI MAKNA HASIL WAWANCARA**				**Tafsiran**
Mathius Awoitauw S.E, M.Si	Khairul Lie S.km, M.Kes	Teed J. Mokay S.Sos, M.Si	Wahyu Kuncoro	
Dari segi standar yang paling tinggi belum, karena rumah sakit daerah baru dikelola. Tapi kami bantu untuk akses jalan masuk ke rumah sakit khushs COVID-19 karena tidak boleh disatukan dengan aktivitas rumah sakit lainnya. Kita juga memaksimalkan tenaga medis baik dari TNI, Polri, dan swasta. Kami juga bantuk untuk memberi 5 ambulance untuk meningkatkan pelayanan. Kami juga arahkan masyarakat untuk tetap bisa fit.	Walaupun memiliki kendala dalam penggalangan APBD, namun terkait kebutuhan rumah sakit dalam pemenuhan alat media APD dan hal lainnya telah berhasil pemerintah daeerah sesuaikan demi menunjang layanan kesehatan ini.	Ada kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan dengan tujuan supaya pelayanan kesehatan dan pengobatan. Pemerintah tetap berupaya untuk memenuhi standar yang bagus untuk masyarakat. Masyarakat juga diberi kesadaran,	Peran pemerintah tentu sangat banyak dan tentu kami meminta kerjasama dari warga sendiri, banyaknya hal yang dipersiapkan oleh pemerintah Jayapura untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Dalam hal kebutuhan rumah sakit dan sebagainya, masih belum memenuhi standar paling tinggi. Bahkan ada kendala perihal penggalangan dana. Namun pemerintah sangat berusaha untuk memaksimalkan tenaga medis serta berbagai kebutuhannya dan berusaha untuk tetap memenuhi standar yang baik. Tentu dengan kerjasama dari masyarakat juga yang mengerti kondisi COVID-19 ini.